

Peran Indonesia dalam Berbagai Konflik Internasional

Perdamaian dunia, terutama sengketa internasional menjadi tugas Perserikatan Bangsa-bangsa. Dalam beberapa konflik internasional yang terjadi, PBB kerap mengandalkan pemerintah Indonesia untuk menjadi penengah. Beberapa konflik internasional yang ditangani oleh pemerintah Indonesia yakni: Perang Iran dan Irak Kamboja Somalia Bosnia-Herzegovina Mozambik Filipina Baca juga: Servius Dumais Wuisan: Peran dan Perjuangannya Perang Iran dan Irak Pada 22 September 1980, pasukan Irak tengah menerobos perbatasan Iran akibat masalah perbatasan yang berlarut-larut antara kedua negara.

Setelah kurang lebih dua tahun bertugas hingga Februari 1944, Kontingen XII mencetak prestasi yang menonjol. Kontingen XII berhasil membebaskan enam personel United Nations Transitional Authority in Cambodia atau UNTAC, operasi penjaga perdamaian PBB di Kamboja. Selain itu, mereka juga berhasil menyelamatkan dua pengamat yang ditangkap Khmer Merah.

PERANG SOMALIA

Pada 1992, terjadi upaya penggulingan Presiden Siyad Barre dari kedudukannya di Somalia. Upaya ini dilakukan oleh sekelompok gerilyawan yang menentang kebijakannya, sehingga berakibat tumpahnya pertempuran. Dari pertempuran tersebut, banyak rakyat yang merasa kelaparan. Tidak sedikit juga yang kemudian menungsi dari Somalia ke negara tetangganya, seperti Ethiopia dan Kenya. Melihat kondisi Somalia saat itu, PBB memprakarsai perdamaian dan bertindak sebagai penengah dengan mengusahakan gencatan senjata. PBB kembali memilih Indonesia untuk berperan aktif dalam mengatasi masalah di Somalia. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Juli 1992, pemerintah Indonesia mengirim Kontingen Garuda XIII menuju Somalia. Tugas mereka berakhir pada 5 Februari 1995.

PERANG BOSNIA

Perang Bosnia terjadi pada Maret 1992, yang disebabkan oleh adanya perbedaan agama yang tidak disikapi dengan bijaksana. Perang ini melibatkan Bosnia dan Herzegovina, yang kemudian berujung dengan pertumpahan darah. Dari pertempuran ini, sejumlah lebih dari 8000 orang tewas dengan tragis, serta terjadi pembersihan etnis. Dalam mengatasi masalah di Bosnia-Herzegovina, PBB meminta Indonesia untuk mengirimkan Kontingen Garuda XIV. Tugas mereka dimulai bulan oktober 1993 hingga Juli 1996, yaitu sebagai pengamat militer pada United Nations Military Observer (UNMO). Kemudian, bulan November 1994, pemerintah Indonesia mengirimkan tim pengamat yang tergabung dalam United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG), Kontingen Garuda XV. Selain sebagai pengamat, mereka juga bertugas sebagai duta bangsa, yaitu memberikan penjelasan tentang Indonesia dan pasukan

ABRI kepada masyarakat. Tugas Kontingen Garuda XV berakhir tahun 2000 dengan hasil yang memuaskan.

PERANG MOZAMBIK

Perang Mozambik dimulai tahun 1977, ketika Mozambik telah meraih kemerdekaannya dari Portugal. PBB kemudian meminta Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda XVI pada Juni 1984 hingga 1994. Namun, keberhasilan ini ditentang oleh Gerakan Pemberontak Mozambik yang mendapat dana dari pemerintah Rhodesia dan Afrika Selatan. Akibatnya, terdapat sekitar 1.000.000 juta orang tewas dalam pertempuran dan kelaparan. Hubungan antara Mozambik dengan Afrika Selatan semakin memburuk yang mengakibatkan timbulnya kekacauan politik dan militer di Mozambik. Untuk mengatasi hal tersebut, PBB berperan sebagai penengah untuk melakukan perdamaian di antara kedua negara ini.

KONFLIK FILIPINA

Ketegangan konflik antara Filipina dan Moro National Liberation Front (MNLF) berakar dari adanya keinginan MNLF untuk mendirikan negara Islam di Filipina. Akan tetapi, keinginan ini ditentang oleh pemerintah Filipina, sehingga terjadi pertempuran di antara keduanya. Jumlah orang yang tewas dalam konflik ini sangat bergaam, tetapi diperkirakan ada sekitar 6.015 orang. Dalam proses perjanjian perdamaian antara pemerintah Filipina, pemerintah Indonesia turut berpartisipasi dalam mengatasi konflik tersebut. Pemerintah RI mengirimkan Kontingen Garuda XVII yang berangkat pada Oktober 1994. Mereka bertugas sebagai tim pengamat gencatan senjata antara pemerintah Filipina dan Moro National Liberation Front (MNLF). Selama penugasan, Kontingen Garuda XVII dapat menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan baik. Hal ini terbukti dengan keberhasilan mereka dalam mendekatkan hubungan antara pihak MNLF dengan Filipina. Sebagai perwujudannya, Agustus 1996, kedua pihak tersebut melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, yang kemudian sepakat dalam Perjanjian Perdamaian antara Filipina dan MNLF.